	News Title : Asa Pembentukan Bursa Sawit Indonesia	
	Media Name : Koran Tempo	Journalist : CAESAR AKBAR
	Publish Date : 20 May 2023	Tonality : Positive
	News Page : 1	News Value : 330,000
	Resources : Didid Noordiatmoko (Kepala Bappebti), Eddy Martono (Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki)), Gulat Medali Emas Manurung (Ketua Umum Apkasindo), Ayip Said Abdullah (Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP)), Bhima Yudhistira (Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios))	
	Section/Rubrication : Berita Utama	Topic : Bursa CPO

Asa Pembentukan Bursa Sawit Indonesia

Pembentukan Bursa Sawit Ditargetkan Rampung Pada Juni Mendatang, Diharapkan Bisa Membuat Perdagangan CPO Lebih Transparan.



JAKARTA — Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menargetkan pelaksanaan bursa komoditas sawit pada awal Juni mendatang. Pelaksanaan bursa ini menargetkan luncurnya Platform Bursa Perdagangan yang sudah menyempatkan luncurnya ekspor minyak sawit mentah (CPO). Artinya, semua ekspor CPO baru dilakukan melalui bursa berjangka komoditas. "Komoditas yang wajib bursa hanya CPO yang akan di ekspor dengan nilai US\$ 6,5 miliar," ujar Kepala Bappebti, Didid Noordiatmoko, dalam acara konferensi pers, kemarin. Ia mengatakan luncurnya tersebut dipilih pemerintah lantaran beberapa opsi lainnya.

Sebelumnya, pemerintah juga mengaji untuk menjangkau perdagangan ekspor dan domestik CPO serta produk turunan level bursa. Namun pada akhirnya opsi tersebut tidak dipilih. Alasannya, mengacu pada praktik di luar negeri, misalnya Malaysia, harga acuan produk sawit ditentukan berdasarkan harga CPO.

Dengan asumsi produksi CPO dan produk turunannya di Indonesia mencapai 50 juta ton, sebanyak 30 juta ton diekspor. Dari jumlah produk yang diekspor, US\$ 6,5 miliar berjumlah lebih kurang 10 persen, atau sekitar 3 juta ton. "Sekarang harga CPO US\$ 6,5 miliar, berarti bisa ada produk turunan CPO atau komoditas lainnya," kata Didid. "Itu tidak mudah jadi akan menjadi model (perencanaan)."

Bursa juga: Potensi Angka Segar bagi Ekspor Sawit

Transparansi Harga



Menurut Didid, kehadiran bursa dalam perdagangan komoditas akan meningkatkan transparansi harga dan data perdagangan. Menurutnya, selama ini perdagangan CPO cenderung bilateral dan sehingga dianggap tidak transparan. Perdagangan CPO yang semakin transparan diharapkan bisa membuat harga CPO Indonesia lebih menguntungkan bagi petani kecil sawit dan bisa tempo lain. "Ujung-ujungnya, pemerintah sangat anti pengalihan ekspor komoditas pun meningkat."

Pada tahap awal pemberlakuan bursa perdagangan ini, tahapan ekspor CPO dianggap tidak banyak berubah. Ekspor tetap harus memiliki ketentuan wajib pasok di dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) sebelum bisa masuk ke bursa dan menjadi persiapan ekspor.

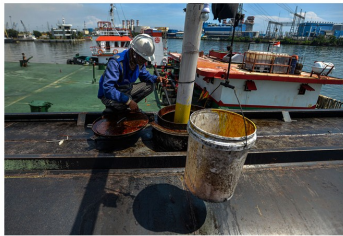
Tambahan lainnya adalah para pelaku usaha harus membaratkan sejumlah biaya untuk berdagang di bursa. Didid menjelaskan biaya ini tidak harus memberatkan, justru akan digunakan untuk asuransi. "Nanti bursa akan bertanggung jawab kalau ada gagal bayar dan gagal serah," kata dia.

Apabila bursa telah berjalan lebih optimal, Didid tak menutup peluang kebijakan DMO bisa dihapus. Alasannya, harga ekspor CPO memang bisa saja diatur melalui bursa. Namun, selama bursa masih belum berjalan optimal, kebijakan DMO masih berlaku.

Terdapatnya bursa komoditas pun diharapkan dapat mengartikan Indonesia memiliki harga referensi perdagangan CPO sendiri, tanpa perlu mengacu ke Bursa Rotterdam dan Malacca seperti saat ini. Didid menyadari harga acuan tersebut akan semakin terlokalisasi ketika bursa dioperasikan. "Transparansi, harga referensi bisa ditanyakan pada ahli tahun, setelah adanya tahapan price discovery. Kalau harga sudah diyakini pasar sebagai referensi, selanjutnya bisa ditetapkan menjadi harga penentuan ekspor," ujar Didid.

Bursa juga: Gempakan Implementasi Biodiesel B35

Menunggu Aturan Biaya Bursa



Demi rencana mandatori ekspor CPO melalui bursa, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Eddy Martono, mengatakan pelaku usaha sudah menargetkan luncurnya bursa dari pemerintah. Salah satu ketentuan yang diamanatkan adalah biaya bursa dan pihak yang akan dilayani ekspor tersebut. "Apakah hanya penjual, atau pembeli juga akan terkena biaya?" ujar dia.

Kemudian kemudian, Eddy mengatakan pada prinsipnya Gapki menentang pelaksanaan bursa tersebut. Apalagi kalau nantinya bisa memberikan harga referensi untuk perdagangan sawit Indonesia. "Kalau memang harganya baik dan menjadikan produk sawit kita, utamanya untuk ekspor, menjadi bagus dan kompetitif, pasti Gapki mendukung."

Dukung juga mengaji dari Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo). Ketua Umum Apkasindo, Gulat Medali Emas Manurung, menilai rencana ini tender di PT Kharisma Pemasaran Berasama Nusantara (KPRB) cenderung tidak kompetitif dan tidak transparan. Alasannya, menurut Gulat, petani akan diwajibkan oleh proses tender tersebut. Sebab, dia menambahkan, harga yang tidak kompetitif menyebabkan harga tandan buah segar sawit petani tertekan.

"Kalau harganya selalu ditekan tekan oleh peserta tender, tentu yang ada adalah kerugian dan kami petani akan terkena dampak seperti ini terjadi. Sebab, mungkin harga TR adalah nilai harga standar CPO di KPRB," ujar Gulat. Karena itu, ia menargetkan pembentukan bursa CPO harus segera dilaksanakan untuk mendorong adanya penetapan harga CPO yang lebih transparan dan adil.

Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Ayip Said Abdullah, mengatakan pembentukan bursa menjadi instrumen penting untuk mengatasi atau perdagangan CPO yang selama ini sulit diandalkan. Namun keberadaan bursa ini harus diawasi dan diawasi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, berharap kemungkinan terbesar dari pembentukan bursa adalah adanya transparansi transaksi CPO. Dengan terbukanya transaksi, penghitungan pendapatan ekspor bisa lebih adil. Di samping itu, keberadaan bursa diharapkan bisa menekan nilai ekspor ekspor yang tidak sesuai dengan volume dan harga aktual.

Bhima berharap kerangka ekspor melalui bursa tidak hanya berlaku untuk CPO, tapi juga secara bertahap diterapkan ke produk pertanian CPO. "Mungkin bisa dilihat orang-orang lain bisa tahu. Sama-sama banyak transaksi CPO (pada produk turunan) melalui bursa berjangka, harga referensi menjadi lebih akurat."